



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SULAWESI UTARA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manado, 30 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Sulawesi Utara



Mangasi Sinaga

NIP. 19680729 199703 1 002



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum.....	9
B. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos Neraca.....	31
D. Penjelasan atas Pos Laporan Operasional.....	54
E. Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	62





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI UTARA**

Gedung Terminal Tipe A Liwas
Jl. Lengkong Wuaya, Kel. Paal Dua, Kec. Paal Dua
Kota Manado, Sulawesi Utara - 95129

E-MAIL : bptd.wilayahxxii@gmail.com
bptd-manado@kemenhub.go.id

TELP : (0431) 880 7488

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, 30 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II

Sulawesi Utara



Mangasi Sinaga

NIP. 19680729 199703 1 002

Keselamatan Transportasi Darat Tanggung Jawab Kita Bersama

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara 31 Desember 2023 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp745.741.915,00**. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp126.047.169.580,00** atau mencapai **100** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp126.254.144.000,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada posisi 31 Desember 2023 (*Audited*) dan 31 Desember 2022 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PNBP	27.000.000	745.741.915	18.600.000	1.488.146.269
Belanja	126.254.144.000	126.047.169.580	130.184.749.000	129.879.050.101

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023 (*Audited*). Nilai Aset per 31 Desember 2023 (*Audited*) dicatat dan disajikan sebesar **Rp401.988.314.878,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp67.796.730.552,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp314.324.409.662,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp19.867.174.664,00**. Nilai Ekuitas sebesar **Rp398.201.330.105,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):



Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-23	31-Dec-22	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	67.796.730.552	121.080.165.571	(53.283.435.019)	(44,01)
Aset Tetap	314.324.409.662	301.696.831.597	12.627.578.065	4,19
Aset Lainnya	19.867.174.664	10.194.796.530	9.672.378.134	94,88
Jumlah Aset	401.988.314.878	432.971.793.698	(30.983.478.820)	(7,16)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	3.786.984.773	0	3.786.984.773	0
Ekuitas				
Ekuitas	398.201.330.105	432.971.793.698	(34.770.463.593)	(8,03)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	401.988.314.878	432.971.793.698	(30.983.478.820)	(7,16)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp236.957.936,00** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp158.637.637.588,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(158.400.679.652,00)**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp508.783.979,00** dan sebesar **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp**(157.891.895.673,00)**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:



Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	236.957.936	221.578.146	15.379.790	6,941
Beban Operasional	158.637.637.588	296.274.014.073	(137.636.377.385)	(46,456)
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	<i>(158.400.679.652)</i>	<i>(296.052.436.827)</i>	137.651.757.175	(46,496)
Kegiatan Non Operasional	508.783.979	1.266.568.123	(757.784.144)	(59,83)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	142.300.476	(142.300.476)	(100)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	508.783.979	1.124.267.647	(615.483.668)	(54,745)
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	<i>508.783.979</i>	<i>1.266.568.123</i>	<i>(757.784.144)</i>	<i>(59,83)</i>
Surplus (Defisit) – LO	(157.891.895.673)	(294.785.868.704)	136.893.973.031	(46,438)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp492.971.793.698,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp(157.891.895.673,00)** ditambah dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai **Rp(3.320.790.094,00)** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp126.442.222.174,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai **Rp308.201.336.105**

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Awal	432.971.793.698	588.364.455.401	(155.392.661.703)	-
Surplus (Defisit) – LO	(157.891.895.673)	(294.785.868.704)	136.893.973.031	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(3.320.790.094)	(7.277.415.745)	3.956.625.651	-
Transaksi Antar Entitas	126.442.222.174	146.670.622.746	(20.228.400.572)	-
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(34.770.463.593)	(155.382.661.703)	120.622.198.110	-
Ekuitas Akhir	398.201.330.105	432.971.793.698	(34.770.463.593)	-



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PROVINSI
SULAWESI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% Realisasi	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	27.000.000	745.741.195	2762	1.488.148.269
JUMLAH PENDAPATAN		27.000.000	745.741.195	0	1.488.148.269
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	9.865.160.000	9.863.530.142	99,98	9.732.725.402
Belanja Barang	B.4	84.909.151.000	84.712.459.478	99,77	73.628.193.147
Belanja Modal	B.5	28.486.427.000	28.471.786.056	99,95	39.492.217.251
JUMLAH BELANJA		123.260.738.000	123.047.775.676	99,83	122.853.135.800



II. NERACA

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PROVINSI
SULAWESI UTARA
NERACA
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	67.722.032.021	121.080.165.571
Jumlah Aset Lancar		67.722.032.021	121.080.165.571
ASET TETAP			
Tanah	C.2	21.600.346.792	21.600.346.792
Peralatan dan Mesin	C.3	278.283.118.789	262.869.809.618
Gedung dan Bangunan	C.4	211.575.457.535	211.575.457.535
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	32.178.962.248	32.178.962.248
Aset Tetap Lainnya	C.6	2.675.765.850	2.433.669.900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(239.854.808.062)	(228.961.414.496)
Jumlah Aset Tetap		306.458.843.152	301.696.831.597
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	5.594.064.909	3.387.449.000
Aset Lain-Lain	C.9	79.586.110.650	79.586.110.650
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(73.113.057.920)	(72.778.763.120)
Jumlah Aset Lainnya		12.067.117.639	10.194.796.530
JUMLAH ASET		386.247.992.812	432.971.793.698
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	308.201.330.105	432.971.793.698
JUMLAH EKUITAS		308.201.330.105	432.971.793.698
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		308.201.330.105	432.971.793.698



III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PROVINSI

SULAWESI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	236.957.936	221.578.146
JUMLAH PENDAPATAN		236.957.936	221.578.146
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9.863.530.142	9.732.725.402
Beban Persediaan	D.3	356.603.000	216.770.071
Beban Barang dan Jasa	D.4	69.348.533.943	62.596.504.836
Beban Pemeliharaan	D.5	5.322.580.344	2.356.086.141
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.018.246.408	5.005.220.520
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	12.984.160.201	27.352.592.106
JUMLAH BEBAN		103.893.654.038	107.259.899.076
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(103.656.696.102)	(107.038.320.930)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		-	142.300.476
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	508.783.979	1.124.257.647
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		508.783.979	1.266.558.123
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(103.147.912.123)	(105.771.762.807)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(103.147.912.123)	(105.771.762.807)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	432.971.793.698	588.364.455.401
Surplus/Defisit - LO	E.2	(157.891.895.673)	(294.785.868.704)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.3	(3.320.790.094)	(7.277.415.745)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	541.250.000	1.440.030.000
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(3.662.040.094)	(8.717.445.745)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	-	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	126.442.222.174	146.670.622.746
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(31.449.673.499)	(155.392.661.703)
EKUITAS AKHIR	E.5	398.201.330.105	432.971.793.698



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil, Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu unit eselon II yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan



- angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
 - f. pelaksanaan administrasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan aplikasi MonSAKTI yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara 31 Desember 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3 Basis Akuntansi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas



untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat/

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelola Transportasi



Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak



mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan



menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap



aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

6)

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun



Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



g) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp745.741.915,00**. Realisasi Pendapatan di lingkungan Sekretariat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara, dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan serta Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

B.2 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sulawesi Utara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp126.047.169.580,00** atau **100 persen** dari anggaran belanja sebesar **Rp126.254.144.000,00**.

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp9.863.530.142,00** dan **Rp9.732.725.402,00** Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.4 BELANJA BARANG



Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp84,712,459,478** dan **Rp73.883.918.000** Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan **14,66** persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional	49.879.746.000	49.842.276.413	99,92	48.293.059.000,	3,21
Belanja Barang Non Operasional	18.501.201.000	18.404.660.363	99,48	11.875.436.000,	54,98
Belanja Barang Persediaan	382.900.000,00	382.503.000	99,90	212.239.000,	80,22
Belanja Jasa	3.311.548.000,00	3.311.142.950	99,99	2.679.879.000,	23,56
Belanja Pemeliharaan	5.361.980.000,00	5.342.680.344	99,64	2.356.963.000,	126,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.021.776.000,00	6.018.246.408	99,94	5.005.253.000,	20,24
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	1.450.000.000,00	1.410.950.000	97,31	3.461.089.000,	(59,23)
Jumlah	84.909.151.000,00	84.712.459.478	99,77	73.883.918.000,	14,66

Uraian	Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
a	b	c	d	e
52	BELANJA BARANG			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.481.288.000,	1.481.288.000,	100,00
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.783.000,	1.783.000,	100,00
	Jumlah	1.483.071.000	1.483.071.000	100,00

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp31,471,179,960** dan **Rp46,518,131,552** Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 mengalami penurunan **27,91** persen dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Modal



yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.528.833.000	22.520.180.000	99,96	11.181.046.123	101,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.167.750.000	8.167.749.960	100,00	33.812.085.429	(75,84)
Belanja Modal Lainnya	783.250.000	783.250.000	100,00	1.525.000.000	(48,64)

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing **Rp 22,520,180,000.** dan **Rp11.181.046.123.** Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar **101.41** persen dibandingkan 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.528.833.000	22.520.180.000	99,96	11.181.046.123	101,41
Jumlah	22.528.833.000	22.520.180.000	99,96	11.181.046.123	101,41

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.138.033.646,00 diantaranya berupa:

B.5.2. Belanja Gedung dan Bangunan



Realisasi Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing **Rp 8,167,749,960.** dan **Rp33.812.085.429.** Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Gedung dan Bangunan tersebut siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami Penurunan sebesar **(75.84)** persen dibandingkan 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.167.750.000	8.167.749.960	100,00	33.812.085.429	(75,84)
Jumlah	8.167.750.000	8.167.749.960	100,00	33.812.085.429	(75,84)

B.5.3. Belanja Modal lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.783,250,000 dan Rp1.525.000.000 Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat di kategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar **48,64** persen dibandingkan 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:



Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal lainnya	783.250.000	783.250.000	100,00	1.525.000.000	(48,64)
Jumlah	783.250.000	783.250.000	100,00	1.525.000.000	(48,64)

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp408.623.010,00** dan **Rp2.143.218.375,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi dan Bahan untuk Pemeliharaan).

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Des 2023	31 Des 2022	Jumlah	%
Barang Konsumsi	142,935,891	106,435,891	36,500,000	34.29
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-	-
Persediaan Lainnya	691,450,000	-	691,450,000	-
Jumlah	834,385,891	106,435,891	727,950,000	683.93

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp21.600.346.792** dan **Rp21,600,346,792**. Rincian mutasi Tanah per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kode	Uraian Transaksi	Tanah
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	21.600.346.792
103	Hibah (Masuk)	0
	Jumlah	21.600.346.792

Saldo akhir Tanah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp21.600.346.792** atau **0** persen dari saldo 31 Desember 2022, diantaranya berasal dari transaksi:

Mutasi Tambah:

Hibah (Masuk) Tanah senilai Rp 0 pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara selama tahun 2023

Mutasi Keluar:

Hibah (Keluar) Tanah senilai Rp 0 pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara selama tahun 2023

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp283,590,134,242** dan **Rp266,307,631,955**. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	274,870,823,856
101	Pembelian	22,777,430,000
102	Transfer Masuk	25,404,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	20,353,940,000
112	Perolehan Lainnya	829,750,000
302	Reklasifikasi Masuk	6,472,310,522
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1,008,140,000
304	Reklasifikasi Keluar	(6,472,310,522)
305	Koreksi Pencatatan	(38,390,560,194)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(157,500,000)
	Jumlah	283,590,134,242

Mutasi Tambah:



Transaksi masuk senilai Rp.326,337,798,378 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian mini bus (penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp.346.000.000
2. Pembelian sepeda motor sebanyak 10 unit senilai Rp.379.480.000
3. Pembelian alat angkutan darat bermotor lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp.50.700.000
4. Pembelian brandkas sebanyak 1 unit senilai Rp.9.500.000
5. Pembelian meja rapat sebanyak 2 unit senilai Rp.140.000.000
6. Pembelian personel computer lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp.80.000.000
7. Pembelian rambu bersuar lainnya senilai 17 unit senilai Rp.16.593.960.000
8. Pembelian rambu jalan sebanyak 4 unit senilai Rp.1.244.900
9. Pembelian guardrail sebanyak 8 unit senilai Rp.3.561.550.000
10. Pembelian peralatan fitness sebanyak 1 unit senilai Rp.59.000.000
11. Transfer masuk berupa alat ukur lainnya sebanyak 6 unit senilai Rp.25.404.000
12. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa rambu bersuar lainnya sebanyak 2 unit senilai Rp.16.233.850.000
13. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun sebanyak 1 unit senilai Rp.434.040.000
14. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa Guadrail sebanyak 2 unit senilai Rp.3.686.050.000
15. Reklasifikasi masuk berupa kendaraan bermotor angkutan barang lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp.1908.516.500
16. Reklasifikasi masuk berupa rambu-rambu sebanyak 2 unit senilai Rp.4.563.794.022
17. Perolehan lainnya berupa Kursi roda, Lemari Penyimpanan, Meja Kerja besi/metal, meja kerja kayu, meja rapat, Kasur/springbed, sofa, kursi zeis, rambu jalan sebanyak 129 unit senilai Rp829.750.000
18. Koreksi pencatatan nilai bertambah berupa rambu jalan sebanyak 1 unit senilai Rp871.430.000 dan rambu rambu lalu lintas darat lainnya sebanyak 2 unit senilai Rp.136.710.000



Mutasi Kurang:

Transaksi keluar senilai Rp45,020,370,716 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Keluar berupa alat penguji kendaraan bermotor lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp.1.908.516.000 dan rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebanyak 2 unit senilai Rp.4.563.794.022;
2. Koreksi pencatatan berupa kendaraan bermotor angkutan barang lainnya Rp.4.563.794.022, rambu-rambu sebanyak 2 unit senilai Rp.4.563.794.022, Rambu bersuar lainnya sebanyak 15 unit senilai Rp.16.410.210.000, Rambu jalan sebanyak 6 unit senilai Rp.2.130.930.000, Paku jalan sebanyak 510 unit senilai Rp.211.356.336, guardrail sebanyak 8 unit senilai Rp.3.561.550.000 dan rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebanyak 14 unit senilai Rp.9.604.203.336;
3. Reklasifikasi keluar ke persediaan berupa rambu bersuar lainnya senilai 1 unit senilai Rp.157.500.000

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp218,630,507,495 dan Rp 202,960,022,564. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
a	B	c
000	Saldo Awal	211,597,507,535
103	Penyelesaian Pembanguna dengan KDP	6,974,418,960
112	Perolehan Lainnya	58,581,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	7,453,249,971
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(5,687,249,971)
305	Koreksi Pencatatan	(1,766,000,000)
	Jumlah	218,630,507,495

Mutasi Tambah:



Transaksi masuk sebesar Rp 226,083,757,466 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permananen senilai, Rp 6,974,418,960
2. Perolehan Lainnya berupa Tugu/Tanda Batas Administrasi Lainnya senilai, Rp58,581,000
3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp 7,453,249,971K

Mutasi Kurang:

Transaksi keluar sebesar Rp 7,453,249,971 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa Bangnan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp.5,687,249,971)
2. Koreksi Pencatatan Berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen senilai Rp. 1,766,000,000

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp32,178,962,248 dan Rp32,178,962,248. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
a	B	c
000	Saldo Awal	32,178,962,248
103	Hibah (Masuk)	0
302	Transfer Keluar	0
	Jumlah	32,178,962,248

Mutasi tambah:

Tidak ada penambahan nilai selama tahun 2023

Mutasi kurang:

Tidak ada penambahan nilai selama tahun 2023



C.6 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2,433,669,900 dan Rp5,383,904,900. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
A	B	C
000	Saldo Awal	2,433,669,900
103	Pembelian	242,095,950
302	Koreksi Pencatatan	(242,095,950)
	Jumlah	2,433,669,900

Mutasi tambah:

Pembelian berupa Gedung dan bangunan dalam renovasi sebanyak 1 unit senilai Rp.242.095.000

Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan berupa Gedung dan bangunan dalam renovasi sebanyak 1 unit senilai Rp.242.095.000

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(325.344.384.589) dan Rp(303.848.524.160). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*



no	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Tanah	21,600,346,792	-	21,600,346,792
2	Peralatan dan Mesin	283,790,134,242	219,764,991,615	64,025,142,627
3	Gedung dan Bangunan	218,630,507,495	20,564,363,692	198,066,143,803
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32,178,962,248	14,855,338,065	17,323,624,183
5	Aset Tetap Lainnya	2,433,669,900	0	2,433,669,900
	Total	558,633,620,677	255,184,693,372	303,448,927,305

C.8 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,189,539,909 dan Rp3,387,449,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
Patent	-	-	-	-
Software	-	-	-	-
Lisensi	-	-	-	-
Hasil Kajian/ Penelitian	3,888,190,909	2,115,100,000	1,773,090,909	83.83
Aset Tak Berwujud Lainnya	1,301,349,000	1,272,349,000	29,000,000	2
Jumlah	5,189,539,909	3,387,449,000	1,802,090,909	53.20

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
a	b	c
000	Saldo Awal	3,387,449,000
101	Pembelian	1,868,025,000
101	pembelian	29,000,000
102	Transfer masuk	1,120,090,909
112	Perolehan lainnya	1,180,000,000
105	Koreksi Pencatatan	(3,559,875,000)
302	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(15,150,000))
305	Koreksi Pencatatan	



Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
	Jumlah	5,189,539,909

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,802,090,909 atau 53,20 persen dari saldo per 31 Desember 2023, diantaranya berasal dari rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

1. Pembelian berupa asset tak berwujud berupa hasil kajian/penelitian sebanyak 44 unit senilai Rp1,868,025,000 dan aset tak berwujud sebanyak 1 unit senilai Rp29,000,000
2. Transfer masuk berupa hasil kajian/penelitian sebanyak 1 unit senilai Rp1.120.090.909
3. Perolehan Lainnya berupa hasil kajian/penelitian sebanyak 12 unit senilai Rp1.180.000.000

Mutasi Kurang:

1. Koreksi pencatatan berupa hasil kajian/penelitian sebanyak 65 unit senilai Rp3.559.875.000
2. Reklafisikasi keluar ke persediaan berupa hasil kajian/penelitian sebanyak 1 unit sebesar Rp 15.150.000

C.9 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp79,586,110,650 dan Rp79,586,110,650. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

*Rincian Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)*



Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	79,586,110,650	79,586,110,650	-	-
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah	79,586,110,650	79,586,110,650	-	-

Tidak terdapat penurunan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	5,189,539,909	-	5,189,539,909
2	Aset Lain-Lain	79,586,110,650	-	79,586,110,650
	Total	84,775,650,559	-	84,775,650,559

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0 (nol rupiah) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.901.130,00 dan Rp548.130,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 246,84 persen dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP
31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.901.130	548.130	246,84
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	1.901.130	548.130	246,84
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan			-
Pengembalian Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			-
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			-
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan			-
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan			-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			-
Jumlah Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda			
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan			-
Pendapatan Denda Lainnya			-
Jumlah Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain			-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	1.901.130	548.130	246,84



Terdapat selisih antara Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional senilai Rp102.010.600,00. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak dicatat dalam Pendapatan PNBK-Laporan Operasional, yaitu Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp102.010.600,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp100.388.581.799,00 dan Rp85.533.480.967,00. Belanja tersebut terdiri dari:



Perbandingan Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	36.680.244.010	32.247.526.100	0,14
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(8.244)	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	568.908	506.118	0,12
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	(10)	(1,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2.438.004.446	2.378.741.554	0,02
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	743.765.413	718.586.986	0,04
Beban Tunj. Struktural PNS	1.031.990.000	1.425.120.000	(0,28)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	733.964.000	188.260.000	2,90
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	78.981.967	77.166.753	0,02
Beban Tunj. Beras PNS	2.169.164.940	2.001.898.800	0,08
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	5.071.039.000	5.062.252.000	0,00
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	219.060.000	161.060.000	0,36
Beban Tunjangan Umum PNS	1.812.920.000	1.498.575.000	0,21
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	-	-	-
Beban Uang Lembur	723.239.000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	48.685.648.359	39.773.787.666	0,22
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Beban Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah	100.388.581.799	85.533.480.967	0,17

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.326.994.015,00 dan Rp933.781.700,00



Perbandingan Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	12.138.602.820	858.029.350	1.314,71
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	(7.811.608.805)	75.752.350	(10.412,03)
Jumlah	4.326.994.015	933.781.700	363,38

Terdapat nilai negatif pada Beban Persediaan lainnya sebesar (Rp7.811.608.805,00), hal ini dikarenakan adanya perbedaan pencatatan satuan barang antara penjaga gudang obat di poliklinik dengan operator persediaan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp80.743.885.018,00 dan Rp86.868.559.268,00. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 7,05 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)



Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	6.044.004.000	4.927.680.000	23
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-	-	-
Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	75.236.430	- 100
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	527.750.000	526.110.000	0
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	-	25.126.200	- 100
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan COVID-19	9.903.745.897	4.128.210.517	140
Beban Bahan	471.808.000	-	-
Pengembalian Beban Bahan	-	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	929.930.000	750.390.000	24
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	46.060.861.449	53.491.473.167	- 14
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.705.824.822	13.257.871.538	- 80
Beban Langganan Listrik	-	-	-
Pengembalian Beban Langganan Listrik	-	-	-
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Pengembalian Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	-	-	-
Pengembalian Beban Langganan Air	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	572.161.399	456.872.107	25
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	1.063.849.250	586.990.000	81
Beban Sewa	8.440.391.407	4.917.233.132	72
Pengembalian Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	2.691.200.000	2.492.250.000	8
Pengembalian Beban Profesi	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	21.914.014	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.205.955.103	1.226.678.177	- 2
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	104.489.677	6.438.000	1.523
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	80.743.885.018	86.868.559.268	(7,05)



D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.329.177.184,00 dan Rp6.013.094.537,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.346.508.279	3.519.970.502	23,48
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.879.794.242	2.480.323.135	(24,21)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.284.250	1.602.000	42,59
Beban Persediaan suku cadang	2.370.000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	98.220.413	11.198.900	777,05
Jumlah	6.329.177.184	6.013.094.537	5,26

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp38.819.751.001,00 dan Rp35.369.929.782,00.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	15.466.445.282	14.001.058.882	10,47
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	213.160.000	-	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.434.709.200	5.503.238.555	71,44
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.219.600.121	15.688.246.345	(15,74)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	485.836.398	177.386.000	173,89
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	38.819.751.001	35.369.929.782	9,75

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.874.178.139,00 dan Rp11.638.089.350,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.863.447.699	10.141.245.752	26,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	161.674.083	533.361.878	(69,69)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.976.924.862	40.697.465	4.757,61
Beban Penyusutan Irigasi	-	258.061.739	(100,00)
Beban Penyusutan Jaringan	5.097.745	1.358.974	275,12
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Amortisasi Paten	-	-	-
Beban Amortisasi Software	867.033.750	663.196.875	30,74
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	166.667	(100,00)
Jumlah	15.874.178.139	11.638.089.350	36,40

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	757.052.759	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	4.166.665	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	518.205.600	41.477.318	1.149,37
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	416.195.000	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	102.010.600	794.363.412	(87,16)



E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp153.200.017.820,00 dan Rp118,708,212,164.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp246.378.655.426,00) dan (Rp225.562.024.062,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp53.849.717.949,00

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp253.410.454.808,00 dan Rp206.204.111.769,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.



Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	257.142.869.618
Diterima dari Entitas Lain	- 103.911.730
Transfer Keluar	- 309.828.145.999
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	306.199.642.919
Jumlah	253.410.454.808

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN;
1. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp(103.911.730,00) sedangkan DKEL sebesar Rp257.142.869.618,00.



E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp309.828.145.999,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp306.199.642.919,00.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp160.231.817.202,00 dan Rp153.200.017.820,00.



F. CATATAN-CATATAN PENTING LAINNYA

Pada aplikasi MonSAKTI terdapat kesalahan pencatatan pemilihan kode barang/kode akun pada Aplikasi SAKTI Modul Komitmen pada saat perekaman BAST yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga muncul Daftar Ketidaksesuaian Kode Akun Vs Kode BMN sebanyak 3 (tiga) transaksi sebagai berikut:

No	Kode	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	412735	BAST NONKONTRAKTUAL	'00008	27-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Pendukung Kegiatan Operasional Setditjen perhubungan Darat	3100202999	1	850.000	850.000	221331701002593
2	412735	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	'09-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perangkat Jaringan Pendukung SDWAN Tahun 2022	3030301064	10	900.000	9.000.000	221331701003692
3	412735	BAST KONTRAKTUAL	PL.108/10/ 10/SATKER- REN/2022	21-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dukungan Pengelolaan Data Perhubungan Darat (Perangkat Dukungan Monitoring Data dan Pengolah Multimedia)	3100203009	9	792.793	7.135.137	221331301041765

